BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Agraris yang mana memiliki arti bahwa pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Pada abad ke-15 dan 16 Indonesia menjadi incaran bangsa Portugis, Belanda Inggris dan Negara Eropa Barat lainnya untuk mendapatkan rempah-rempah dengan kualitas tinggi yang kemudian dipasarkan pada pasar Eropa Barat seperti Perancis, Spanyol , Swiss, dan Belanda. Pada masa tersebut sebagian besar investasi yang ditanamkan ke *Netherlands Indie* atau Indonesia US$ 1,6 miliar, 54% diantaranya pada bidang pertanian (Mubyarto, 1991:12). Pertanian pada kala itu mengalami masa kejayaan namun seiring berkembanganya zaman pertanian mulai tergeser dengan bidang industri.

Terdapat berbagai alasan mengapa sektor pertanian menjadi fondasi utama dalam pembangunan. Pertama, barang – barang hasil industri memerlukan dukungan daya beli masyarakat. Karena sebagian besar calon pembelinya adalah masyarakat petani yang memerlukan mayoritas penduduk negara – negara berkembang, maka tingkat pendapatan mereka perlu ditingkatkan melalui pembangunan pertanian. Untuk membangun pabrik – pabrik yang *modern* dan efisien, diperlukan ukuran minimum yaitu luas produksi yang lebih luas dengan daya beli yang memadai. Kedua, untuk menekan ongkos dari produksi dari upah komponen dan gaji diperlukan tersedianya bahan – bahan makanan yang murah, sehingga upah dan gaji yang diterima dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan

pokok buruh dan pegawai. Ini bisa dicapai apabila produksi hasil pertanian, terutama pangan, dapat ditingkatkan sehingga harganya bisa lebih murah dan terjangkau oleh daya beli. Ketiga, industri juga membutuhkan bahan mentah yang berasal dari sektor pertanian, dan karena itu produksi bahan – bahan industri memberikan basis bagi pertumbuhan industry itu sendirI (Rahardjo, 1986:4).

Daerah Jawa Tengah secara geografis dikelilingi pegunungan vulkanik dan sumber air melimpah yang berarti lahan pertanian menjadi subur. Posisi geografis yang menguntungkan tentunya membawa keuntungan tersendiri bagi tenaga kerja sektor pertanian apabila dapat mengelola lahan pertanian dengan maksimal.

Tabel 1.1 Kepadatan Penduduk Beberapa Provinsi di Indonesia

Provinsi	Jiwa/km2				
	2009	2010	2013	2014	2015
Jawa Tengah	1.002	989	1.014	1.022	1.03
Jawa Barat	1.124	1.222	1.282	1.301	1.32
Jawa Timur	798	786	803	808	813
DKI Jakarta	1.118	14.518	15.015	15.173	15.328
Bali	652	676	702	710	718
Kalimantan Selatan	90	94	99	101	103
Sulawesi Selatan	171	173	179	180	182
NTB	255	243	254	257	260
NTT	100	97	102	103	105

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki kepadatan penduduk yang besar. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan Jawa merupakan salah pulau yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Hal tersebut terlihat pada tabel 1.1. Penduduk yang melimpah menyebabkan salah satu

permasalahan klasik pada negara – nagara berkambang khususnya Indonesia. Pada Tabel 1.2 menjelaskan bahwa penduduk miskin pada

Tabel 1.2 Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Tenaga Kerja Sektor Pertanian
2014	5 173 986
2015	4 709 707
2016	5 067 891
2017	4 323 993
2018	4 204 249

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Pada tahun 2015 tenaga kerja *informal* sektor pertanian mencapai 90.5% yang artinya daerah Jawa Tengah memiliki partisipasi cukup tinggi dalam sektor pertanian. Seiring berjalannya waktu mengalami pertumbuhan sebesar 92.29% pada tahun 2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 91.72%. Dalam kurun waktu empat tahun pertumbuhan di Jawa Tengah memiliki pertumbuhan yang positif serta terjadi fluktuasi yang wajar.

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani, semakin tinggi NTP relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani (Silitonga,1995; Sumodiningrat,1997,2001; Tambunan, 2003; BPS,2006; Masyhuri,2007). Pedesaan yang merupakan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani hidup di lingkaran kemiskinan. Berdasarkan data BPS (2012) menunjukkan jumlah penduduk miskin yakni berjumlah 18,48 juta jiwa atau 15,12 persen terhadap total penduduk pedesaan. Data tersebut menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap masayarakat tani

dikarenakan erat kaitannya dengan masa depan usaha tani padi dalam kesinambungan produksi padi sebagai makanan pokok.

Sektor pertanian dapat dijadikan sebagai batu loncatan untuk pembangunan di daerah pedesaan serta mempercepat laju perekonomian yang bergerak lambat pada saat ini. Untuk mencapai potensinya dan terpadu dengan perekonomian di pedesaan, investasi sarana mapun prasarana sangat dibutuhkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi pedesaan dari pihak swasta, pemerintah, atau kolektif masyarakat. Pemerintah selama ini menonjolkan pembangunan yang mengakibatkan terabaikannya masyarakat dan swasta. Bidang penelitian,pelatihan dan penyuluhan pertanian tertinggal bahkan tidak terlihat, kecuali alih teknologi di bidang industri yang saat ini terjadi dan menggeser sektor pertanian secara perlahan.

Tabel 1.3 Nilai Tukar Petani 2014 – 2018

Tahun	NTP
2014	100,65
2015	100,24
2016	100,02
2017	100,39
2018	102,24

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Dari Tabel tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pada tahun 2014 – 2018 terjadi fluktuasi yang cukup stabil dan wajar. Tahun 2018 terjadi kenaikan yang cukup tinggi sebesar 1,85 dari tahun – tahun sebelumnya. Dari NTP (Nilai Tukar Petani) dapat terlihat tingkat daya saing produk pertanian yang dihasilkan petani dibandingkan dengan produk lain, sehingga arah perkembangan kebijakan pada

spesialisasi produk unggulan wilayah yang berkualitas dapat dilakukan (BPS, Nilai Tukar Petani 2018:4)

Proses lajunya pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), sehingga tingkat perkembangan PDRB per kapita yang dicapai masyarakat seringkali sebagai ukuran kesuksesan suatu daerah dalam mencapai cita – cita untuk menciptakan pembangunan ekonomi (Sukirno, 1981:23, dalam JEJAK ,2008:1). Semakin besar kontribusi PDRB suatu wilayah maka pelaksanaan pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih baik.

Tabel 1.4 PDRB sektor pertanian tahun 2014 – 2018 Provinsi Jawa Tengah

Tahun	PDRB Sektor Pertanian
2014	107,793,380.89
2015	113,826,299.04
2016	116,331,116.45
2017	118,265,171.80
2018	121,370,041.24

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Kurun waktu lima tahun terakhir 2014 – 2018 PDRB sektor pertanian Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan terus – menerus pada tiap tahunnya yang berarti bahwa sektor pertanian mengalami pertumbuhan pada tahun tersebut sehingga bisa berkontribusi lebih pada PDRB.

Investasi diartikan sebagai suatu usaha untuk menaruh dana dalam bentuk lain yang diharapkan memberikan hasil bernilai tinggi. (Budiman Hutabarat,

2001:25). Penanaman modal atau investasi yang tinggi dapat mempercepat laju perekonomian karena dana yang telah diberikan dapat digunakan untuk pengembangan, inovasi , ataupun pembelian mesin untuk menambah produksi. Pemerintah Indonesia pada tahun 1960 an dan awal 1970 an berinvestasi dalam pembangunan seperti saluran irigasi.

Tabel 1.5 Realisasi Nilai Proyek PMDN dan PMA sektor pertanian

Tahun	PMDN		PMA		Jumlah
	Rp	US$	Rp	US$	
2014	-		17502800	1,400	17,502,800
2015	90,349,000,000		-	-	90,349,000,000
2016	211,300,800,000		9,909,800,000		221,210,600,000
2017	577,828,300,000		41,060,000,000		618,888,300,000
2018	98,130,700,000		5,797,300,000		103,928,000,000

Sumber Data : Jawa Tengah Dalam Angka 2015 – 2019 , diolah

Pada Tabel diatas menunjukkan investasi sektor pertanian mengalami kemajuan dengan bertambahnya angka investasi dari tahun ke tahun. Tahun 2013 nilai investasi sebesar Rp 6.953.4 Miliar dalam jangka lima tahun mengalami kenaikan nilai sebesar Rp 15.993, 6 Miliar menjadi Rp 22.947 miliar pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa Investasi sektor ekonomi mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat meskipun masih jauh tertinggal dari sektor industri.

Beberapa hal penting yang mendasari pembangunan sektor pertanian antara lain: Kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah dan beragam, banyaknya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian serta perannya dalam penyediaan pangan di dalam masyarakat dan menjadi basis utama pertumbuhan di pedesaan. Selain Negara berkembang

Indonesia juga merupakan Negara agraris yang mana memiliki makna sebagian besar penduduk Indonesia bekerja serta menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan jantung dari perekonomian.

Tabel 1.6 Proyeksi Jumlah Penduduk di Indonesia

Pulau	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Sumatera	50.860,30	55.272,90	59.337,10	62.898,60	65.938,30	68.500,00
Jawa	137.033,30	145.143,60	152.449,90	158.738,00	163.754,80	167.325,60
Bali dan Kep Nusa Tenggara	13.129,30	14.108,50	15.047,80	15.932,40	16.751,40	17.495,70
Kalimantan	13.850,90	15.343,00	16.769,70	18.082,60	19.264,00	20.318,10
Sulawesi	17.437,10	18.724,00	19.934,00	21.019,80	21.953,50	22.732,00
Kep. Maluku	2.582,20	2.848,80	3.110,70	3.363,70	3.603,50	3.831,40
Papua	3.622,30	4.020,90	4.417,20	4.793,90	5.139,50	5.449,60
Indonesia	**238.518,80**	**255.461,70**	**271.066,40**	**284.829,00**	**296.405,10**	**305.652,40**

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Faktor tenaga kerja merupakan bagian dari sumber daya manusia (SDM) pada era pembangunan nasional termasuk faktor krusial bagi barometer keberhasilan suatu pembangunan nasional. Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi, hal tersebut bisa menjadi sebuah hambatan apabila pemerintah tidak dapat mengelola potensi tersebut.

Pengangguran yang jumlahnya terus menerus bertambah tentunya akan menambah beban perekonomian daerah dan mengurangi kesejahteraan rakyat (Hadi Sasana, 2009 Dalam e- Jurnal Ekonomi Pembangunan UNUD,2015:925). Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak dan tidak perlu memiliki keterampilan khusus seperti pada sektor lainnya. Hal tersebut bisa menjadi solusi untuk pengangguran dan sekaligus kemiskinan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan atau keahlian terbatas.

Sektor pertanian merupakan identitas Negara Indonesia sebagai Negara agraris. Negara agraris adalah Negara dimana sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani. Namun, seiring berkembagnya zaman sektor pertanian di Indonesia mulai terabaikan dan tergantikan menjadi sektor industri. Kemunduran sektor pertanian dikarenakan kurangnya regulasi yang pro akan sektor pertanian serta rendahnya angka investasi pada sektor pertanian. Hal tersebut menghambat inovasi dan penambahan output sektor pertanian. Sehingga, pertumbuhan sektor pertanian mulai lesu. Pada karya tulis ini mengamati pertumbuhan dan dampak sektor pertanian dari tahun 1994 -2018 dengan pengujian menggunakan metode *Error Correction Model*.

Dari latar belakang diatas sehingga tercetus penelitian yang berjudul **"Pengaruh PDRB Sektor Pertanian, Nilai Tukar Petani, Dan Investasi Sektor Pertanian Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah"**

B. Rumusan Masalah

Penyerapan tenaga kerja adalah salah satu tolak ukur keberhasilan suatu sektor atau unit usaha. Di Provinsi Jawa Tengah jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dari tahun 1994 – 2018 mengalam fluktuasi. Angka penyerapan tenaga kerja tertinggi dalam kurun waktu tersebut pada tahun 2003 mencapai 6.776.309 jiwa dan mengalami penurunan yang sangat drastis di tahun 2004 sebesar 6.180.379. Pada tahun 2006 mengalami peningkatan drastis dari 1.205.500 menjadi 6.180.379 dan tahun selanjutnya mengalami fluktuasi normal namun cenderung menurun.

Keberhasilan suatu sektor dapat dilihat melalui dari jumlah tenaga kerja dan seberapa jauh pemerintah mampu menciptakan dan menambah lapangan pekerjaan. Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian merupakan yang tertinngi disbanding sektor – sektor lainnya khususnya Provinsi Jawa Tengah, namun sumbangan terhadap PDRB tidak begitu besar dibandingkan dengan sektor lainnya khususnya industri pengolahan. Dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian sangatlah tinggi namun, cenderung diabaikan oleh pihak pemerintah dikarenakan sumbangsih terhadap PDRB masih rendah. Berdasarkan permasalahan diatas dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana perkembangan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, nilai tukar petani, dan investasi sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah tahun 1994 – 2018 ?
2. Bagaimana pengaruh PDRB sektor pertanian, nilai tukar petani, dan investasi sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah tahun 1994 – 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uaraian di atas maka tujuan dari penelitian dalam menganalisis PDRB sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Investasi sektor pertanian terhadap Penyerapan Tenaga Kerja sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

   Mengkaji apakah ada pengaruh PDRB Sektor Pertanian , Nilai Tukar Petani, dan Investasi Sektor Pertanian Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah tahun 1994 – 2018.

2. Tujuan Khusus

   a. Menganalisi perkembangan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, PDRB sektor pertanian, nilai tukar petani, dan investasi sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah tahun 1994 – 2018.

   b. Menganalisis pengaruh PDRB sector pertanian, nilai tukar petani, dan investasi sector pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sector pertanian di Provinsi Jawa Tengah tahun 1994 – 2018.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik bersifat kademis ataupun praktis. Berikut manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat

   Berharap masyarakat mengetahui pengaruh PDRB Sektor Pertanian , Nilai Tukar Petani , dan Investasi Sektor Pertanian Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah tahun 1994 – 2018.

2. Bagi Sekolah

   Sekolah dapat menjadikan referensi bahan ajar ataupun rujukan bagi siswa/mahasiswa.

3. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menambah wawasan dari penelitian yang dilakuan dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh selama penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari : Bab I Pendahuluan , Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, dan Bab V berisi Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang dari studi ini yang selanjutnya dirumuskan permasalahn penelitina yang berupa pertanyaan kajian. Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian. Pada bagian terakhir dalambab ini akan dijabarkan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori – teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Berdasarkan teori dan hasil beberapa penelitian terdahulu, sehingga akan terbentuk suatu kerangka pemikiran dan penentuan hipotesis awal yang akan diuji.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai variabel – variabel yang dipakai dalam penelitian serta definisi operasionalanya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian. Selain itu, bab ini akan menguraikan mengenai analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dan pembahasan mengenai hasil analisis dari objek penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dalam pembahasan, serta saran.